

Analisis Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Sumatera Barat

Gerry Hamdani Putra ¹, Ilvi Rahmi Efendi ², Elsa Meirina ³, Elvirha Dwi Kartika ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan dan Pembangunan Padang

Abstrak

Fluktuasi anggaran belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2020–2024 serta masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga Agustus 2024, realisasi belanja daerah tercatat masih stagnan pada kisaran 31% di tingkat kabupaten/kota dan 41% di tingkat provinsi, yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya transisi kepemimpinan menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diiringi kebijakan efisiensi anggaran turut menjadi konteks penting dalam dinamika belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta publikasi Badan Pusat Statistik selama periode penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah lebih dipengaruhi oleh besarnya dana transfer dan tuntutan pelayanan publik akibat pertumbuhan penduduk dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

This research is motivated by the fluctuations in the regional budget in West Sumatra Province during the 2020-2024 period and the low realization of regional budget absorption which was a concern of the central government during the administration of President Joko Widodo. Until August 2024, the realization of regional spending is still stagnant in the range

of 31% at the district/city level and 41% at the provincial level, which shows that budget management is not optimal in supporting economic growth. In addition, the transition of leadership to the government of President Prabowo Subianto, accompanied by budget efficiency policies, is also an important context in the dynamics of regional spending. This study aims to analyze the influence of the Special Allocation Fund (DAK) and the number of population on regional expenditure with economic growth as a moderation variable. The approach used is quantitative by utilizing secondary data in the form of reports on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and publications by the Central Statistics Agency during the research period. The analysis method used was panel data regression with the Moderated Regression Analysis (MRA) approach. The results of the study show that the Special Allocation Fund (DAK) and the population have a positive and significant effect on regional spending. However, economic growth has not been shown to be able to moderate the relationship between the Special Allocation Fund and the number of population to regional spending. These findings indicate that the increase in regional spending is more influenced by the amount of transfer funds and public service demands due to population growth than economic growth conditions, so local governments need to optimize the effectiveness and efficiency of budget management.

Keywords: Special Allocation Fund, Population, Regional Spending, Economic Growth.

Copyright (c) 2026 Gerry Hamdani Putra

✉ Corresponding author :

Email Address : gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pembangunan daerah memiliki peran strategis sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan wilayah (Nurhelis, 2023). Salah satu instrumen yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah belanja daerah, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan belanja daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran (Indonesia, 2019). Tingkat belanja daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan kemampuan fiskal internal maupun faktor eksternal yang memengaruhi kapasitas keuangan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga memperoleh dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui berbagai skema transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, jumlah penduduk turut menjadi faktor

yang berpengaruh karena berkaitan erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan layanan publik dan pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah terjadinya fluktuasi belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024. Fluktuasi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan dan penyerapan anggaran daerah belum berlangsung secara stabil dari tahun ke tahun. Di samping itu, capaian realisasi belanja daerah masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa hingga 7 Oktober 2024 realisasi belanja daerah baru mencapai 56,59 persen dari total anggaran sebesar Rp6,81 triliun, sedangkan realisasi fisik tercatat sebesar 69,22 persen atau masih berada di bawah target yang telah ditetapkan (Sugiarto, 2024). Selanjutnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melaporkan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2024 hanya mencapai 92,97 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp117 miliar yang belum terserap. Sisa anggaran tersebut sebagian berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum dapat direalisasikan secara penuh (Sumbar, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara lebih optimal.

Persoalan rendahnya penyerapan belanja daerah telah lama menjadi perhatian pemerintah pusat karena berkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian target pembangunan. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, realisasi anggaran daerah sering kali dinilai belum optimal karena sebagian besar penyerapan anggaran terjadi menjelang akhir tahun anggaran. Pola tersebut berpotensi mengurangi efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan (Ulya & Santosa, 2024; Wuryasti 2024). Perhatian terhadap isu tersebut semakin meningkat setelah pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada era Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp18,3 triliun (Evandio, 2025). Kebijakan efisiensi tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Melalui fungsi tersebut, DAK diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan belanja daerah. Secara empiris, pengaruh DAK terhadap belanja daerah masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian (Cantika & Rivandi, 2023; Fakhirah *et al.*, 2022) membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sebaliknya, (Ginting *et al.*, 2025; Salindeho, 2016) menemukan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan

antara DAK dan belanja daerah masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Dari perspektif keuangan publik, jumlah penduduk mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang dan jasa publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, semakin besar pula tuntutan terhadap penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Konsekuensinya, peningkatan jumlah penduduk akan mendorong meningkatnya kebutuhan anggaran daerah yang tercermin dalam belanja daerah. Secara empiris, pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian (Fatimah *et al.*, 2024; Handayani *et al.*, 2022; Safaah *et al.*, 2022) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sebaliknya, (Fajriati *et al.*, 2021; Yuliani & Suhana, 2023) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah penduduk dan belanja daerah masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang belum sepenuhnya terjawab dalam kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja daerah. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Alokasi Khusus, jumlah penduduk, dan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh bertambahnya output barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu (Mulyaningsih, 2019). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang lebih baik serta kapasitas fiskal yang lebih memadai. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus secara lebih efektif sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berperan dalam memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah, baik dengan memperkuat maupun memperlemah pengaruh kedua variabel tersebut.

Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik fiskal, kependudukan, dan perekonomian yang menunjukkan dinamika yang menarik untuk dianalisis. Selama periode 2020–2024, daerah ini mengalami fluktuasi belanja daerah yang bersamaan dengan perubahan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi pascapandemi, serta penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada transfer ke daerah. Kondisi tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji hubungan antara Dana Alokasi Khusus, jumlah penduduk, dan belanja daerah. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan ketiga variabel tersebut, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, masih relatif sedikit dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif sekaligus memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan fenomena, kajian teoritis, dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah, serta menguji kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut dengan belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah, Dana Alokasi Khusus, dan faktor demografis. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada analisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah, serta menguji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yang merupakan perpaduan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* terdiri atas 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, sementara data *time series* mencakup rentang waktu penelitian selama lima tahun, yaitu periode 2020–2024.

Objek penelitian meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 daerah, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling*, sehingga seluruh populasi ditetapkan sebagai sampel penelitian. Dengan periode observasi selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, total data yang digunakan dalam analisis berjumlah 95 observasi.

Data penelitian dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Sumber data berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang menyediakan informasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), jumlah penduduk, belanja daerah, serta pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat dasar teoritis penelitian, dilakukan pula kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif guna memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, serta Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menganalisis fungsi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Alokasi Khusus, jumlah penduduk, dan belanja daerah. Seluruh analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Alokasi Khusus	95	24.35	26.73	25.7598	.60530
Jumlah Penduduk	95	10.93	13.77	12.3191	.80233
Pertumbuhan Ekonomi	95	-10.46	6.87	2.8532	2.96496
Belanja Daerah	95	26.95	28.57	27.6257	.38190
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan 95 observasi yang seluruhnya valid. Variabel Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 27,6257 dengan simpangan baku 0,38190, yang menunjukkan tingkat belanja daerah relatif stabil antar kabupaten/kota. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata 25,759 dan simpangan baku 0,60530, sehingga menunjukkan adanya variasi alokasi DAK yang masih tergolong stabil. Variabel Jumlah Penduduk memiliki rata-rata 12,3191 dengan simpangan baku 0,80233, yang mencerminkan adanya perbedaan jumlah penduduk antar daerah. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata 2,8532 dengan simpangan baku 2,96496, yang menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama periode penelitian. Secara umum, hasil statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik dan variasi masing-masing variabel pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11270261
Most Extreme	Absolute	.087

Differences	Positive	.087
	Negative	-.069
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.070
Monte Carlo Sig. (2- Sig. tailed) ^d		.069
	99% Confidence Interval	Lower Bound .062
		Upper Bound .075

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,070 pada 95 observasi. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Hasil ini diperkuat oleh pengujian Monte Carlo yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,069 dengan interval kepercayaan 99% pada rentang 0,062 hingga 0,075. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengujian hipotesis penelitian.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	19.450	.744		26.154	.000		
Dana Alokasi Khusus	.149	.041	.236	3.619	.000	.224	4.473

Jumlah Penduduk	.353	.031	.741	11.394	.000	.224	4.473
-----------------	------	------	------	--------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel *Coefficients* bagian *Collinearity Statistics*, variabel Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Penduduk masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,224 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 4,473 (< 10). Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model memenuhi kriteria uji multikolinearitas, yaitu memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen, sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas dan variabel Dana Alokasi Khusus serta Jumlah Penduduk layak digunakan untuk menjelaskan variasi Belanja Daerah.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-.443	.445		-.995	.322
Dana Alokasi Khusus	.022	.025	.199	.916	.362
Jumlah Penduduk	-.004	.019	-.046	-.209	.835

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,362 dan Jumlah Penduduk sebesar 0,835. Kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil ini mengindikasikan bahwa varians residual cenderung konstan pada seluruh tingkat variabel independen yang digunakan. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga estimasi koefisien regresi dapat dianggap konsisten dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut serta pengujian hipotesis penelitian.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.860	.857	.09312	2.095

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,095. Dengan jumlah observasi sebanyak 95 dan dua variabel independen, diketahui nilai batas atas (dU) sebesar 1,7091 sehingga diperoleh nilai $(4 - dU)$ sebesar 2,2909. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW berada di antara dU dan $(4 - dU)$, yaitu $1,7091 < 2,095 < 2,2909$. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi berada pada daerah bebas autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar residual dalam model penelitian. Dengan demikian, asumsi autokorelasi telah terpenuhi, yang mengindikasikan bahwa estimasi parameter regresi bersifat stabil dan layak digunakan untuk analisis regresi serta pengujian hipotesis lebih lanjut.

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	19.450	.744		26.154	.000
	Dana Alokasi Khusus	.149	.041	.236	3.619	.000
	Jumlah Penduduk	.353	.031	.741	11.394	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji t, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,619 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel (1,986) dan memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus akan diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah. Selain itu, variabel Jumlah Penduduk memperoleh nilai t-hitung sebesar 11,394 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($11,394 > 1,986$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Jumlah Penduduk juga berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah daerah, sehingga mendorong peningkatan Belanja Daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dan hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima.

Uji R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.913	.911	.11392

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R Square sebesar 0,913, yang menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan 91,3% variasi Belanja Daerah. Sementara itu, 8,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan Belanja Daerah.

Uji MRA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.310	.822		23.484	.000
Dana Alokasi Khusus	.141	.043	.223	3.255	.002
Jumlah Penduduk	.380	.060	.798	6.296	.000
Pertumbuhan Ekonomi	.099	.190	.767	.521	.604
X1Z	.013	.020	.075	.654	.515
X2Z	-.008	.015	-.726	-.501	.618

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh persamaan regresi:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3Z + B_4X_1Z + B_5X_2Z + e$$

$$Y = 19.310 + 0.141X_1 + 0.380X_2 + 0.099Z + 0.013X_1Z - 0.008X_2Z + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah ($\beta = 0,141$; Sig. = $0,002 < 0,05$), demikian pula Jumlah Penduduk yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah ($\beta = 0,380$; Sig. = $0,000 < 0,05$). Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Sig. = $0,604 > 0,05$). Selain itu, variabel interaksi DAK dan Pertumbuhan Ekonomi (X_1Z) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,515, sedangkan interaksi Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2Z) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,618. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus maupun Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan temuan penelitian, Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,619 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan DAK akan diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah. Kondisi tersebut terjadi karena DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Provinsi Sumatera Barat, kebutuhan pembangunan yang cukup tinggi serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan DAK menjadi salah satu sumber pendanaan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Putra (2024) serta Sofiyani & Subadriyah (2020) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, DAK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t hitung sebesar 11,394 dengan tingkat signifikansi 0,000, di mana t hitung lebih besar dari t tabel ($11,394 > 1,986$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula Belanja Daerah yang harus dialokasikan pemerintah. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan layanan sosial lainnya. Selain itu, perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota serta adanya urbanisasi ke wilayah perkotaan turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Handayani et al., 2022) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah karena semakin besar populasi suatu wilayah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian, jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat Belanja Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA), diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,515 ($> 0,05$), sehingga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara DAK dan Belanja Daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena DAK merupakan dana transfer khusus dari pemerintah pusat yang penggunaannya telah ditetapkan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional, sehingga pengaruhnya terhadap Belanja Daerah lebih ditentukan oleh besarnya alokasi dana yang diterima daripada kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, struktur perekonomian Sumatera Barat yang masih didominasi sektor-sektor tradisional menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriyanti & Dewi (2024) serta Satepuk *et al.* (2024) yang menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah. Dengan demikian, pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah tetap berlangsung tanpa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil Moderated Regression Analysis (MRA), diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,618 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan publik akibat bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat tetap harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya cenderung meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, sehingga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian, termasuk dampak pandemi COVID-19 pada awal periode pengamatan, belum mampu memengaruhi hubungan antara jumlah penduduk dan Belanja Daerah. Dengan demikian, besarnya Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh tekanan kebutuhan penduduk dibandingkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi DAK yang diterima pemerintah daerah, semakin besar pula belanja yang dapat direalisasikan untuk

mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik. Selain itu, Jumlah Penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik, sehingga pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara DAK dan Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat serta besarnya alokasi dana yang diterima daerah dibandingkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi juga tidak mampu memoderasi pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan publik akibat pertambahan jumlah penduduk tetap harus dipenuhi oleh pemerintah daerah tanpa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat lebih dipengaruhi oleh faktor fiskal dan faktor demografis, yaitu Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Penduduk, dibandingkan oleh Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan perencanaan anggaran yang mempertimbangkan dinamika jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Referensi :

- Cantika, D., & Rivandi, M. (2023). Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 52–69. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.726>
- Evandio, A. (2025). *Targetkan hemat Rp306,69 triliun, Prabowo perintahkan Tito Karnavian awasi belanja pemda.* *Bisnis.Com.* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250123/9/1834319/targetkan-hemat-rp30669-triliun-prabowo-perintahkan-tito-karnavian-awasi-belanja-pemda>
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Wacana Publik*, 15(02), 75–85. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.71>
- Fakhirah, A. Y., Yulina, B., & Mubarok, H. (2022). *Determinasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin Dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.* 11(1), 1451–1460.
- Fatimah, Y., Utami, W. B., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis.*
- Febriyanti, K. W., & Dewi, N. A. W. T. (2024). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 15 N.*

- Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.4, No.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sorot*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Indonesia, P. R. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi* (N. Kania (ed.)). CV KIMFA MANDIRI.
- Nurhelis, E. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah III Cirebon*. S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati.
- Putri, C. R., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 673–681. <https://doi.org/10.47233/jebis.v4i4.1954>
- Safaah, N., Syani, Z., Aprilianto, F., & Anwar, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.1, No.
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.3.
- Satepuk, Y. Y., Haryati, R., & Ardiany, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/EPJA>, Vol. 2, No.
- Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 4, 33–47.
- Sugiarto, H. (2024). *Realisasi Belanja APBD Pemprov Sumbar 2024 Rendah! Keuangan Baru 56,59%, Fisik 69,22%*. Padang Ekspres Digital Media. <https://padek.jawapos.com/sumbar/2365168849/realisasi-belanja-apbd-pemprov-sumbar-2024-rendah-keuangan-baru-5659-fisik-6922?>
- Sumbar, D. (2025). *Realisasi APBD Sumbar Tahun 2024 Belum Sesuai Harapan*. DPRD SUMBAR. <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2593?>
- Ulya, F. N., & Santosa, B. (2024). *Belanja Daerah Baru 31 Persen, Jokowi: Kecil Sekali, Segera Realisasikan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/11204411/belanja-daerah-baru-31-persen-jokowi-kecil-sekali-segera-realisasikan?>
- Wuryasti, F. (2024). *Serapan APBD Masih 31%, Jokowi Desak Kepala Daerah Realisasikan APBD*. MetroTVnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9Gxg-serapan-apbd-masih-31-jokowi-desak-kepala-daerah-realisasikan-apbd>
- Yuliani, D., & Suhana, S. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Dan Keadilan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi. *Jesya*, 6(1), 61–78. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.839>